





















#### 4. Adanya manfaat / jasa dari akad *ijārah* tersebut

Sebagai sebuah transaksi umum, *al-ijārah* baru dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya. Sebagaimana yang berlaku secara umum dalam transaksi lainnya.<sup>49</sup>

#### 4. Syarat *Ijarah*

Syarat *ijārah* terdiri empat macam, sebagaimana syarat dalam jual beli, yaitu syarat *al-inqad* (terjadinya akad), syarat *an-nafāz* (syarat pelaksanaan akad), *syarat sah*, *syarat lazim*.<sup>50</sup>

##### 1. Syarat terjadinya Akad

Syarat *in 'inqad* (terjadinya akad) berkaitan dengan akid, zat akad, dan tempat akad.<sup>51</sup> Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiah, akid (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 7 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijārah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijārah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak *mumayyiz* adalah sah, tetapi bergantung atas keridhaan walinya.

<sup>49</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama cet. 1, 2000) h. 121

<sup>50</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 125

<sup>51</sup> Ibid, h. 125





- a) Selesai bekerja
  - b) Mengalirnya manfaat, jika *ijārah* untuk barang. Apabila terdapat kerusakan pada barang sebelum dimanfaatkan dan sedikitpun belum ada waktu yang berlaku, *ijārah* menjadi batal.
  - c) Memungkinkan mengalirnya manfaat jika masanya berlangsung, ia mungkin mendapatkan manfaat pada masa itu sekalipun tidak terpenuhi keseluruhannya.<sup>53</sup>
3. Syarat Sah *Ijārah*

Keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan 'aqid (orang yang akad), *ma'qūd 'alaih* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (upah), dan zat akad (*nafs al-aqad*), yaitu:

- a. Adanya keridhaan dari kedua pihak yang akad

Syarat ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat *al-Nisā'* ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>54</sup>

<sup>53</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung: PT. Alma'arif, 1987 ) h. 12

<sup>54</sup> Departemen Agama RI al-Hikmah, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 83



e. Sewa bulanan

Menurut jumbuh ulama Syafiyah, seseorang tidak boleh menyatakan, “ saya menyewakan rumah ini setiap bulan Rp. 50.000,00” sebab pernyataan seperti ini membutuhkan akad baru dalam setiap membayar. Akad yang betul adalah dengan menyatakan, “Saya sewa selama sebulan”.

f. Penjelasan jenis pekerjaan

Penjelasan jenis pekerjaan sangat penting dan diperlukan ketika menyewa orang untuk bekerja sehingga tidak terjadi kesalahan atau pertentangan.

g. Penjelasan waktu kerja

Tentang batasan waktu kerja sangat bergantung pada pekerjaan dan kesepakatan dalam akad.

4. Syarat Barang Sewaan (*Ma'qūd 'alaih*)

Di antara syarat barang sewaan adalah dapat dipegang atau dikuasai. Hal itu di dasarkan pada hadits Rasulullah SAW. yang melarang menjual barang yang tidak dapat dipegang atau dikuasai, sebagaimana dalam jual-beli.<sup>56</sup>

5. Syarat *Ujrah* (upah)

Para ulama telah menetapkan syarat upah, yaitu:

---

<sup>56</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h.129









mbolehkan upah bagi yang mengajarkan al-Qur'an dan ilmu, karena bisa digolongkan dalam jenis imbalan atas perbuatan dan usaha yang diketahui dengan jelas.<sup>62</sup>

#### 8. Pembayaran upah

Jika *ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib di serahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada musta'jir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (Musta'jir) sudah menerima kegunaan.<sup>63</sup>

#### 9. Hukum Upah –Mengupah

Upah mengupah atau *ijarah 'ala al-mal*, yakni jual beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahitkan pakaian, membangun rumah, dan lain-lain. *Ijarah 'ala al- a'mal* terbagi menjadi dua, yaitu:<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Ibid, h. 16

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, h. 121

<sup>64</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, h. 133

a. *Ijārah* khusus

Yaitu *ijārah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

b. *Ijārah Musytarik*

Yaitu *ijārah* dilakukan secara bersama-sama melalui kerjasama. Hukumnya diperbolehkan bekerja sama dengan orang lain.

c. Pembatalan dan berakhirnya *ijārah*

*Ijārah* adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan fasakh pada salah satu pihak, karena *ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasah*.

*Ijārah* akan menjadi batal (*fasah*) bila ada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
- 2) Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya.
- 3) Rusaknya barang yang di upahkan, seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan.
- 4) Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan.

5) Menurut Hanafiyah, boleh *fasah ijārah* dari salah satu pihak, seperti yang menyewakan toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasahkan sewaan itu.<sup>65</sup>

#### 5. Mempercepat dan Menangguhkan Upah

Menurut mazhab Hanafi bahwa upah tidak dibayarkan hanya dengan adanya akad. Boleh memberikan syarat mempercepat dan menangguhkan upah seperti. Mempercepat sebagian upah dan menangguhkan sisanya, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Jika tidak tercapai kesepakatan saat akad dalam hal mempercepat atau menangguhkan upah sekiranya upah dikaitkan dengan waktu tertentu maka wajib dipenuhi sesudah jatuh tempo.

Jika akadnya atas jasa, maka wajib membayar upah pada saat jasa telah dilakukan. Apabila akad dilaksanakan tanpa syarat mengenai penerimaan bayaran dan penangguhannya, Abu Hanifah dan Malik berpendapat, “Wajib diserahkan berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima.”

Dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh mu’jir harus sesuai dengan kesepakatan dari awal perjanjian, maka dari itu dibutuhkan perjanjian dalam setiap transaksi karena jika tidak ada perjanjian transaksi batal dan

---

<sup>65</sup> Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 122

tidak sah. Dalam hal pemberian upah juga harus dilakukan kesepakatan yang masing-masing pihak menyetujui dan sepakat.

## B. Jasa

### 1. Pengertian jasa

Pada umumnya produk dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Salah satu cara yang banyak digunakan adalah klasifikasi berdasarkan daya tahan atau berwujud tidaknya suatu produk. Berdasarkan kriteria ini, ada tiga produk :

#### 1) Barang tidak tahan lama

Barang tidak tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya habis dikonsumsi dalam satu atau beberapa pemakaian. Contoh sabun, minuman, makanan ringan, kapur tulis, dan lain sebagainya.

#### 2) Barang tahan lama

Barang tahan lama adalah barang berwujud yang biasanya bisa bertahan lama. Contoh Tv, kulkas, mobil, computer, dan sebagainya.

#### 3) Jasa

Jasa merupakan aktivitas, manfaat, atau kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Contoh bengkel reparasi, salon kecantikan, rumah sakit, dan sebagainya.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Nur Nasution, *Manajemen Jasa Terpadu*, (Ghalia Indonesia, 2004), h. 5

Jasa merupakan suatu fenomena yang rumit. Kata jasa mempunyai banyak arti dan ruang lingkup, dari pengertian yang sederhana, yaitu hanya berupa pelayanan dari seseorang kepada orang lain. Jasa juga diartikan sebagai mulai dari pelayanan yang diberikan oleh manusia, baik yang dapat di lihat, yang bisa dirasakan sampai kepada fasilitas-fasilitas pendukung yang harus tersedia dalam penjualan jasa dan benda-benda lainnya.<sup>67</sup>

## 2. Jenis- jenis jasa

### 1) Jenis jasa berdasarkan tindakan yang dapat dilakukan

Jasa dapat dilihat dari dua hal, siapa dan benda apa yang menerima langsung jasa tersebut, empat jenis jasa berikut :

- a. Tindakan nyata yang mengarah kepada konsumen, misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan kecantikan (salon kecantikan)
- b. Tindakan nyata yang mengarah kepada benda milik konsumen, misalnya jasa laundry
- c. Tindakan tidak nyata yang mengarah kepada hal-hal yang bersifat non fisik, misalnya jasa hiburan
- d. Tindakan tidak nyata yang diarahkan kepada kekayaan konsumen, misalnya jasa keuangan<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> Farida jafar, *Manajemen Jasa Pendekatan Terpadu*, (Ghalia Indonesia, 2005), h. 15

<sup>68</sup> Ibid, h. 32

## 2) Jenis jasa berdasarkan hubungan baik dengan pelanggan

Produsen melakukan hubungan yang baik kepada konsumen agar konsumen selalu tertarik dengan penawaran jasa yang diberikan produsen, misalnya jasa asuransi, jasa perbankan, jasa penyewaan mobil.

## 3) Jenis jasa berdasarkan tersedianya tempat pelayanan

Penyedia jasa membutuhkan cara penyampaian dan tempat pelayanan untuk meyakinkan konsumen bahwa penyedia jasa mempunyai kualitas untuk membantu penawaran jasa mereka lebih maju. Misalnya, dengan menggunakan jaringan sosial internet, penyedia jasa kecantikan mempunyai tempat pelayanan yaitu salon kecantikan sehingga konsumen yang mendatangi tempat penyedia jasa.<sup>69</sup>

### 3. Jasa dalam Hukum Islam

Jasa yang ditawarkan dalam ekonomi islam didasarkan kepada *'aqidah* pokok dalam *mu'amalah*, yaitu apa saja dibolehkan, kecuali yang dilarang. Ini berarti bahwa jasa yang disediakan adalah jasa yang diperbolehkan dalam islam.<sup>70</sup>

Bahwa sebenarnya Allah swt. telah melarang manusia untuk melakukan transaksi yang tidak diperbolehkan agama, sehingga jika suatu

<sup>69</sup> Ibid, h. 38

<sup>70</sup> "Agama Islam dan Ekonomi" dalam, [http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodu/agama\\_islam\\_dan\\_ekonomi.pdf](http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodu/agama_islam_dan_ekonomi.pdf) (15 Agustus 2011)







Islam memperkenankan kepada setiap muslim, bahkan menyuruh agar berpenampilan selalu baik, elok dipandang, anggun, berwibawa, dan hidupnya teratur dengan menikmati perhiasan dan pakaian yang telah diturunkan oleh Allah tersebut. Adapun tujuan dari pakaian dalam pandangan islam ada dua macam: *untuk menutup aurat dan berhias*. Ini merupakan pemberian Allah kepada umat manusia seluruhnya.<sup>76</sup>

يَبْنَىءِ آءِءَمَ قَدَ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَآسًا يُؤَرِي سَوَءَ تِكُمْ وَرِيشًا

Artinya: *Hai anak Adam, Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan.*(Qs. Al A'raf 26).<sup>77</sup>

Seorang wanita yang selalu mengikuti mode, pada hakekatnya ia ingin agar orang lain merasa tertarik, mengagumi, dan memujinya. jika merasa mampu mengungguli wanita lain dan mendapatkan pujian banyak orang, ia lalu menjadi bangga, sombong dan takabbur terhadap mereka.<sup>78</sup>

Akan tetapi kebanyakan wanita mempunyai keahlian khusus dalam mengosongkan kantong suami mereka. Seseorang di antara mereka tidak dapat menahan diri bila melihat kantong suaminya ada sejumlah

<sup>76</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal Wal Haram Fil Islam*, (Bandung: penerbit jabal, 2007), h. 90

<sup>77</sup>Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 224

<sup>78</sup> Muhammad bin Abdul Aziz Al- Musnid, *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis Dan Agama*, (Rembang: pustaka anisah, 2003), h. 79









*dicabutkan, dan orang yang mengikir gigi dengan tujuan kecantikan dan mengubah ciptaan Allah.”*

Lalu ada seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang hal tersebut, dan beliau menjawab: “ bagaimana aku tidak akan melaknat orang yang nabi sendiri melaknatnya.<sup>92</sup> sementara itu sudah termaktub dalam kitabullah. “Allah berfirman:

مَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ

*Artinya: dan apa saja yang diperintahkan oleh rasul kepadamu, maka kerjakanlah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.”*(Al- Hasyr: 7).<sup>93</sup>

Berhias yang dikatakan berlebihan dan mengubah ciptaan Allah adalah sebagai berikut:

- 1) Mencukur alis, yakni mencukur alis dengan tujuan untuk membuat kecil lancip.<sup>94</sup>

Rasulullah bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّامِصَةَ وَالْمَتَنَّمِصَةَ (رواه ابو داود وحسنه)

*Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya* (Riwayat Abu Daud, dengan Sanad yang hasan)

<sup>92</sup> Muhammad bin Abdul Aziz Al- Musnid, *Bahaya Kosmetika Dalam Tinjauan Medis Dan Agama*, (Rembang: pustaka anisah, 2003) h, h. 60

<sup>93</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an Dan Terjemahnya*, h. 916

<sup>94</sup> Syaikh Imam Zaki al-Barudi, *Tafsir Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-kaustar, 2006), h 211







## 5. Masalah dan Mafsadah

Maṣlahah Mursalah, berarti “*manfaat*” dan kata mursalah berarti “*lepas*”. Seperti yang dikemukakan Abdul-Wahhab Khallaf, berarti sesuatu yang dianggap mslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya”, sehingga ia disebut *maṣlahah mursalah* masalah yang lepas dari dalil secara khusus.

Abdul-Karim Zaidan menjelaskan macam-macam masalah :

- a. *al-Maṣlahah al-Mu'tabarah* yaitu masalah yang secara tegas diakui syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.
- b. *al-Maṣlahah al-Mulghah* yaitu sesuatu yang dianggap masalah oleh akal pikiran, tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan ketentuan syariat.
- c. *al-Maṣlahah al-Mursalah* dan masalah macam inilah yang dimaksud dalam pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam definisi yang disebut di atas. Maṣlahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingannya dalam al-Qura'an Sunnah untuk dapat dilakukan analogi.<sup>101</sup>

---

<sup>101</sup> Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana, 2005), h. 148-150